

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TERHADAP KETENTUAN ADMINISTRATIF PRAKTIK KEDOKTERAN

Patrecya Rossa Agustina

Abstrak

Kesehatan merupakan salah satu indikasi pembangunan nasional. Selain untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga sebagai pendukung pertahanan dan daya saing bangsa. Kesehatan erat hubungannya dengan pasien dan tenaga medis, yang dalam hal ini dikaitkan dengan dokter. Seiring berkembangannya zaman, posisi pasien yang tadinya pasif berubah menjadi lebih aktif dan lebih cerdas berkaitan dengan segala tindakan dokter, dimulai dari pemeriksaan, tindakan lanjut, sampai pada perizinan yang dimiliki oleh dokter. Berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dokter mendorong terbentuknya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dokter merupakan adalah satu dari beberapa profesi yang terikat pada suatu ikatan profesi dan diberikan otonomi oleh pemerintah untuk meregulasi dirinya sendiri. Salah satu bukti pemberian otonom dari pemerintah adalah dengan didirikannya lembaga Konsil Kedokteran Indonesia yang bertanggung jawab atas peningkatan kualitas dokter dan pengawasan berjalannya sistem praktik kedokteran di Indonesia. Dengan berdirinya Konsil Kedokteran Indonesia, maka mulai terbentuk peraturan-peraturan pedoman pelaksanaan praktik kedokteran yang dikenal dengan peraturan konsil kedokteran.

Kata kunci : hukum kesehatan, praktik kedokteran, dokter, Konsil Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

JUDICIAL REVIEW OF RESPONSIBILITY OF INDONESIA MEDICAL COUNCIL FOR THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE OF MEDICAL PRACTICE

Patrecya Rossa Agustina

Abstract

Healthy is one of the indicator for national development, in addition to improving the quality of human resources as well as support and competitiveness of the nation's defense. Healthy is closely related to patient and medical personil, which in this case is associated with a doctor. Along ages, patients who had a passive position become more active and more intelligent with regard to all the actions of doctors, starting from the examination, further action, until the license owned by the doctor. Reduced levels of public trust in physicians encourage the formation of Law No. 29 Year 2004 regarding Medical Practice. The doctor is is one of the few professions that are bound to a professional bond and given autonomy by the government to regulate itself. One proof of the autonomous administration of government is the establishment of institutions of Indonesian Medical Council is responsible for improving the quality of doctors and medical supervision system work practices in Indonesia. With the establishment of the Indonesian Medical Council, then begin to form guidelines for the implementation of the rules of medical practice known as medical council regulations.

Keywords: health law, the practice of medicine, doctor, Indonesia Medical Council, Indonesian Medical Council of Honor Discipline